



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
2. Jabatan : MENTERI
3. NHK : 229665

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 35.469.705.000

1. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.669.705.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 669 m2/460 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 33.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.687.000.000

1. MOBIL, MERCEDEZ BENZ GLS4504MATX167ATCK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.531.000.000
2. MOBIL, WULING E230REV30KW3LV24X2A Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 174.000.000
3. MOTOR, VESPA GTS150IGETSUPERSPORT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ G 400D JEEP L.C. HDTP Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 3.710.000.000
5. MOBIL, LEXUS LM350H4X2AT AA-LFXVB Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 2.208.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.350.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 13.059.750.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.689.866.659

F. HARTA LAINNYA Rp. 396.340.432



Sub Total	Rp.	118.652.662.091
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	118.652.662.091

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.